

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Simpulan**

##### **5.1.1 Simpulan Umum**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis secara mendalam yang telah dilakukan peneliti dapat diambil kesimpulan secara umum bahwa aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas tunanetra telah tersedia di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung. Hal ini telah menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 telah mampu mengakomodir kesetaraan dan kebutuhan penyandang disabilitas tunanetra di antara masyarakat lain pada umumnya. Fasilitas publik bagi penyandang disabilitas tunanetra yang dimaksud yakni tersedianya akses ke, dari dan di dalam pertamanan; tempat parkir dan tempat turun naik penumpang; tempat duduk/istirahat; tempat minum; toilet; tanda-tanda dan *signage* yang dalam hal ini telah tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009.

Meskipun demikian, aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas tunanetra di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung hingga saat ini belum mampu memuaskan pihak disabilitas tunanetra sebagai pengguna. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang secara umum bersumber pada kurangnya sosialisasi, serta lemahnya pengawasan dan pembinaan dalam menjalankan kebijakan aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas tunanetra di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung tersebut. Hal ini belum didukung dengan antisipasi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan. Upaya yang dilakukan hingga saat ini masih berjalan sehingga belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi

##### **5.1.2 Simpulan Khusus**

Setelah melakukan proses penelitian yang dilanjutkan dengan proses pengolahan data yang terdiri dari *display data*, reduksi data dan triangulasi data, serta melakukan analisis secara mendalam dengan menggunakan teori-teori yang

relevan, selanjutnya peneliti akan memaparkan beberapa kesimpulan khusus yang disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas tunanetra sudah tersedia di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009. Fasilitas publik yang dimaksud yakni: 1) tersedianya akses ke, dari dan di dalam pertamanan; 2) tempat parkir dan tempat turun naik penumpang; 3) tempat duduk/istirahat; 4) tempat minum; 5) toilet; dan 6) tanda-tanda dan *signage*.
2. Penyandang disabilitas belum puas dengan aksesibilitas yang tersedia dikarenakan: 1) fasilitas publik bagi penyandang disabilitas seperti garis kuning, *signagne* serta akses bagi pengguna kursi roda tidak dapat digunakan secara khusus oleh penyandang disabilitas karena seringkali terpakai oleh masyarakat umum; 2) masih banyak penyandang disabilitas tunanetra tidak mengetahui titik-titik dimana fasilitas tersebut tersedia karena tidak adanya informasi maupun pemberitahuan mengenai lokasi-lokasi tersebut; dan 3) para penyandang disabilitas tidak bisa mengakses fasilitas tersebut di semua Taman Tematik Inklusi karena tidak semua taman tersedia fasilitas tersebut dan tidak dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas.
3. Hambatan yang ditemukan pada proses penyediaan aksesibilitas fasilitas publik di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung bagi penyandang disabilitas tunanetra, diantaranya: 1) kurangnya sosialisasi; 2) lemahnya pengawasan di lapangan; 3) kurangnya kesadaran dari para pengunjung untuk memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tunanetra; dan 4) kurang sigapnya pemerintah dalam mengantisipasi masalah yang ditemukan pada saat implementasi kebijakan tersebut.
4. Upaya Pemerintah Kota Bandung dilakukan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung mengatasi beberapa hambatan yang dihadapi diantaranya: 1) melakukan pengawasan terhadap aksesibilitas fasilitas publik di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung bagi penyandang disabilitas tunanetra; 2) melakukan koordinasi dengan komisi terkait di DPRD untuk melakukan rapat dengar pendapat; 3) melakukan evaluasi internal untuk mengevaluasi kekurangan dan hambatan yang terjadi

dalam upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan pada proses penyediaan aksesibilitas fasilitas publik di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung bagi penyandang disabilitas tunanetra dan 4) bentuk tindak lanjutnya melalui peningkatan upaya penyuluhan dan pembinaan. Upaya peningkatan yang dimaksud yakni dilakukan dengan peningkatan upaya sosialisasi yang intensif tidak hanya melalui media cetak maupun elektronik tetapi juga dengan turun langsung ke taman-taman tematik. Selain itu pembinaan yang dilakukan dengan cara melakukan pendampingan di lokasi Taman Tematik Inklusi dengan melibatkan masyarakat dan beberapa organisasi kemasyarakatan.

## 5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan, penulis mengharapkan ada beberapa implikasi terhadap stakeholder yang terlibat dalam penelitian ini. Ada pun implikasi penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan penyediaan aksesibilitas fasilitas publik di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung bagi penyandang disabilitas tunanetra dapat berimplikasi terhadap terjaminnya hak-hak penyandang disabilitas tunanetra tersebut, serta mampu menciptakan kesetaraan antara penyandang disabilitas tunanetra dengan masyarakat umum lainnya. Hal ini perlu dilakukan supaya implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 sebagai payung hukumnya mampu berkontribusi secara penuh terhadap penyandang disabilitas tunanetra.
2. Ditemukannya ketidakpuasan penyandang disabilitas tunanetra terhadap aksesibilitas fasilitas publik di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung diharapkan dapat berimplikasi terhadap upaya pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu diharapkan pula dapat menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat lainnya untuk secara bersama-sama menumbuhkan kesadaran untuk memberikan kemudahan aksesibilitas fasilitas publik di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung bagi penyandang disabilitas tunanetra.
3. Hambatan-hambatan yang ditemukan pada aksesibilitas fasilitas publik di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung bagi penyandang disabilitas tunanetra

diharapkan dapat berimplikasi terhadap kepekaan pemerintah Kota Bandung untuk segera mengatasinya apabila hingga saat ini permasalahan tersebut belum terselesaikan.

4. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan diharapkan dapat berimplikasi terhadap perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan pada aksesibilitas fasilitas publik di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung bagi penyandang disabilitas tunanetra.

### **5.3 Rekomendasi**

#### **1. Bagi Pemerintah:**

- a. Lembaga eksekutif dan legislatif di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini adalah DPRD dan Pemerintah Kota Bandung hendaknya lebih meningkatkan sinkronisasi dalam menjalankan fungsinya agar dalam implementasi sebuah kebijakan dapat berjalan dengan baik.
- b. Bagi pelaksana kebijakan dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi, pengawasan serta pembinaan terhadap aksesibilitas fasilitas publik di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung bagi penyandang disabilitas tunanetra.

#### **2. Bagi Masyarakat:**

- a. Hendaknya berperan aktif dalam implementasi sebuah kebijakan karena masyarakat mempunyai peranan penting dalam memberikan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut agar implementasi kebijakan menjadi lebih baik lagi.
- b. Hendaknya membantu upaya pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi, pengawasan serta pembinaan terhadap aksesibilitas fasilitas publik di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung bagi penyandang disabilitas tunanetra.

#### **3. Bagi Lembaga Departemen PKn FPIPS UPI:**

- a. Lebih mengintensifkan kajian-kajian mengenai kebijakan pemerintah untuk dijadikan studi kajian di Departemen Pendidikan Kewarganegaraan.

- b. Lebih memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada mahasiswa untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang kebijakan pemerintah.

**4. Bagi Peneliti Selanjutnya:**

- a. Sebaiknya lebih peka terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung agar mahasiswa dapat ikut mengawal proses pelaksanaan kebijakan tersebut.
- b. Sebaiknya mengadakan penelitian lebih mendalam tentang analisis kebijakan publik mengenai sosialisasi, pengawasan serta pembinaan terhadap aksesibilitas fasilitas publik di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung bagi penyandang disabilitas tunanetra kaitanya dengan tantangan era globalisasi agar dapat memberikan informasi baru dan *up to date* bagi kalangan intelektual lainnya serta masyarakat. Selain itu mahasiswa sebagai *agent of change* dengan mengadakan penelitian terhadap isu-isu kontemporer kebijakan Pemerintah Kota Bandung akan mampu memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan sebuah kebijakan.